

Kabupaten  
Pamekasan



# RENJA RENCANA KERJA

2025

DINAS PERIKANAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya **sehingga** “Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025” telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta sekaligus upaya-upaya dalam mengatasi masalah yang dalam hal ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan pada tahun 2025.

Pamekasan, Juni 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. ABDUL FATA, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196708141992031007

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	62
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	65
3.3 Program dan Kegiatan .....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....	75
BAB V PENUTUP.....	83

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rincian Capaian Kinerja Tahun 2022.....	10
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	17
Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022.....	22
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan .....	39
Tabel 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
Tabel 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan .....	42
Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pamekasan .....	47
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepetingan Tahun 2022 Kabupaten Pamekasan.....	56
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.....	64
Tabel 3.2 Sasaran Renja Tahun 2025 .....	66
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 ....	69
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Menurut pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;

- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
23. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Pamekasan No 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2025 adalah untuk menselaraskan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan untuk mengukur capaian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjamin kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah.
3. Untuk memastikan bahwa rumusan sub kegiatan alternatif atau sub kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

- ♣ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - ♣ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - ♣ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dan 2024 sampai dengan triwulan dua.

Total Anggaran Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 4.525.052.824,- yang bersumber dari DAU untuk mendukung pelaksanaan 5 (*lima*) program, 17 (*tujuh belas*) kegiatan dan 34 (*tiga puluh empat*) sub kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.231.093.742,- atau serapan anggarannya sebesar 93,50 %.

Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang menunjang/tidak menunjang pencapaian kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rincian Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	-						
1.	Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP	92,98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	100 %	100	Menunjang
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	100 %	100	Menunjang
					Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	100 %	100 %	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6 sarana	6 sarana	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Menunjang

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100	Menunjang
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>	<b>6 Sarana Aparatur</b>	<b>0 Sarana Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>Tidak Menunjang</b>
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0	Tidak Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>2 jasa penunjang</b>	<b>2 jasa penunjang</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 Laporan	18 Laporan	100	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik</b>	<b>10 Unit</b>	<b>10 Unit</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100	Menunjang

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	508,90						
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	76,80						
3.	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perikanan Yang Mandiri dan Berdaya Saing	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	16,67						
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	5 %	5 %	100	
					Jumlah KUB Yang Naik Kelas	3 Kelompok	4 Kelompok	133,33	Menunjang
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dapat diadakan	2 Sarpras Perikanan tangkap	2 Sarpras Perikanan tangkap	100	Menunjang
				Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Saran usaha perikanan tangkap yang terjamin odan tersedia	10 Unit	10 Unit	100	Menunjang
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang berdaya	50 nelayan	50 nelayan	100	Menunjang
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	100	Menunjang

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	30 Kelompok	30 Kelompok	100	Menunjang
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100	Menunjang
				<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan</b>	<b>50 TDKP</b>	<b>50 TDKP</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	jumlah Rekomendasi tanda daftar kapal nelayan	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	100	Menunjang
				<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100</b>	
					<b>Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>100</b>	
				<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang berdaya</b>	<b>20 Pembudidaya Ikan</b>	<b>20 Pembudidaya Ikan</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Kelompok	10 Kelompok	100	Menunjang
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	8 Kelompok	8 Kelompok	100	Menunjang
				<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan</b>	<b>15 TDPIK</b>	<b>15 TDPIK</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudi dayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	100	Menunjang
				<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang dikelola</b>	<b>2 Sarpras Budidaya</b>	<b>2 Sarpras Budidaya</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	100	Menunjang
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
				<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Cakupan pengawaan sumber daya perikanan</b>	<b>75 %</b>	<b>75 %</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sumber daya perikanan yang terawasi</b>	<b>2 Sumberdaya Perikanan</b>	<b>2 Sumberdaya Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diushakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota	diusahakan dalam kabupaten/kota				
				<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Konsumsi Ikan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
					<b>Jumlah Poklhasr Yang Naik Kelas</b>	<b>2 Kelompok</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>50</b>	<b>Tidak Menunjang</b>
				<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah TDUP Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Kecil Mikro yang Disediakan</b>	<b>10 TDUP</b>	<b>10 TDUP</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
				<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklhasr yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan</b>	<b>5 Poklhasr</b>	<b>5 Poklhasr</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
				Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100	Menunjang
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah konsumsi ikan</b>	<b>43,63 Kg/Kpt/Th</b>	<b>57,89 Kg/Kpt/Th</b>	<b>132,68</b>	<b>Menunjang</b>
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	60 Ton	60 Ton	100	Menunjang

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2023 yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap didukung oleh program pengelolaan perikanan tangkap dengan 2 kegiatan 3 sub kegiatan, program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 1 kegiatan 1 sub kegiatan serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Dari 5 sub kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 terlaksana mencapai target yang ditetapkan.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya didukung oleh program pengelolaan perikanan budidaya dengan 2 kegiatan 4 sub kegiatan dan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 1 kegiatan 1 sub kegiatan serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Dari 5 sub kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 terlaksana mencapai target yang ditetapkan.
3. Peningkatan kelas kelompok pelaku usaha didukung oleh program pengelolaan perikanan tangkap dengan 1 kegiatan 3 sub kegiatan, program pengelolaan perikanan budidaya dengan 1 kegiatan 2 sub kegiatan dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1 kegiatan 1 sub kegiatan. Dari 6 sub kegiatan yang mendukung peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan pada tahun 2023 terlaksana sesuai target yang ditetapkan.
4. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2023 didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 7 kegiatan 17 sub kegiatan. Dari 17 sub kegiatan, hanya 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesil lainnya yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 dilarang untuk melakukan Belanja Modal oleh BPKPD Kabupaten Pamekasan, sehingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terverifikasi oleh BPKPD.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Tujuan/Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan	4,03	2,52*	62,53	<i>Kurang</i>
Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2,00	10,18	508,90	<i>Sangat Baik</i>
	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	4,00	3,07	76,81	<i>Cukup</i>
Meningkatnya SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan	2,00	16,67	833,33	<i>Sangat Baik</i>
Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP	88,19 (A)	82,00 (A)	92,98	<i>Baik</i>

Sumber data : BPS \* dan Dinas Perikanan Kab. Pamekasan Tahun 2023

Berdasarkan data tabel diatas capaian indikator tujuan dinas “persentase pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pada tahun 2023 sebesar 2,52 % dari target tahun 2023 sebesar 4,03 %. Hal ini disebabkan oleh jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Sedangkan capaian IKU Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 10,18 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 2,00 % dengan predikat capaian kinerja *sangat baik* sebesar 508,90 %. Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 22.809,48 ton meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 20.702,38 ton. Peningkatan terjadi pada Tahun 2023 karena banyaknya trip penangkapan, populasi sumberdaya ikan mulai pulih akibat berkurangnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan kegiatan underwater restocking, semakin bervariasinya jenis alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan yang digunakan nelayan. Selain itu yang menyebabkan realisasi di Tahun 2023 sangat tinggi yaitu mencapai 10,18 % dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2022 yaitu 1,754 % adalah terdapat ketidak tepatan penggunaan rumus perhitungan Persentase pada Tahun 2022. Perhitungan persentase peningkatan produksi pada Tahun 2022 dihitung dari besarnya produksi perikanan tangkap pada tahun yang dievaluasi dibandingkan dengan target pada tahun yang dievaluasi, sedangkan perhitungan persentase pada Tahun 2023 menggunakan rumus yang sudah ditetapkan di IKU.
2. Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 3,072 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 4,00 % dengan predikat capaian kinerja *cukup* sebesar 76,81 %. Realisasi jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 1.113,84 ton meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.080,64 ton. Peningkatan jumlah produksi terjadi di Tahun 2023, namun terjadi penurunan persentase peningkatan produksi budidaya dibanding Tahun 2022. Penurunan persentase disebabkan oleh penggunaan rumus perhitungan di Tahun 2022 tidak tepat karena menghitung dari besarnya produksi perikanan budidaya pada tahun yang dievaluasi dibandingkan dengan target pada tahun yang dievaluasi. Sedangkan di Tahun 2023, dilakukan perbaikan dari evaluasi Tahun 2022 yaitu menggunakan rumus

yang sudah ditetapkan oleh IKU.

3. Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan tahun 2023 sebesar 16,67 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 2,00 % dengan predikat capaian kinerja *sangat baik* sebesar 833,33 %. Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang naik kelas tahun 2023 sebanyak 7 kelompok mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 6 kelompok. Peningkatan persentase di Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh penggunaan rumus perhitungan di Tahun 2022 tidak tepat karena menghitung dari besarnya peningkatan kelas kelompok pada tahun yang dievaluasi dibandingkan dengan target pada tahun yang dievaluasi. Sedangkan di Tahun 2023, dilakukan perbaikan dari evaluasi Tahun 2022 yaitu menggunakan rumus yang sudah ditetapkan oleh IKU.
4. Realisasi indikator nilai SAKIP tahun 2023 adalah 82,00 (A) dari target yang ditetapkan 88,29 (A) dengan predikat capain kinerja *cukup* sebesar 92,98 % atau mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 86,35 (A). Penurunan ini disebabkan oleh dokumen perencanaan kinerja yang disusun belum sesuai ketentuan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran Dinas Perikanan tahun 2023 dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terutama dalam pencapaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Dinas Perikanan berperan aktif untuk mencapai indikator tersebut melalui Indikator Kinerja Utama Dinas “Peningkatan Produksi Perikanan dan SDM Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berdaya Saing”.
2. Selain dukungan dari dana APBD Kabupaten, indikator sasaran dinas juga didukung dari dana APBD provinsi dan APBN terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 , antara lain :
  - Kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 berupa kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil antara lain : bantuan hibah

alat bantu penangkapan ikan yaitu mesin kapal perikanan. Sedangkan dari APBD Provinsi berupa bantuan underwater restocking

- Peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 juga didukung dari kegiatan pemberian paket bantuan budidaya sarana dan prasarana budidaya ikan (kolam ikan, pakan mandiri dan obat ikan). Sedangkan dari APBD Provinsi berupa paket bantuan sarana kolam keluarga (kolega) budidaya air tawar di wilayah stunting. Dari dana APBN berupa hibah kolam bioflok untuk komoditas lele serta bantuan benih untuk budidaya air payau.
- Peningkatan produksi perikanan juga didukung melalui kegiatan bantuan paket hibah sarana pengolahan hasil perikanan yang bersumber dana CSR.
- Peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan didukung melalui pendampingan/pembinaan yang terprogram oleh penyuluh perikanan, baik PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) serta pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok. Kegiatan yang mendukung pencapaian peningkatan kelas kelompok diantaranya pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Namun di sisi lain, masih terdapat permasalahan/kegagalan terhadap pencapaian kinerja yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Adanya sub kegiatan tahun 2023 tidak berdampak langsung untuk peningkatan produksi perikanan dan SDM pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing sehingga diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran.
2. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan dari tahun ketahun. Hal ini diakibatkan produksi perikanan tidak menentu dan tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca atau perubahan cuaca yang ekstrem, karena perhitungan PDRB memperkirakan

nilai tambah sub kategori perikanan melalui pendekatan produksi dengan mempertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi perikanan.

3. Kelompok pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pamekasan masih kelas pemula dan sebagian baru terbentuk.

Solusi terhadap permasalahan/kegagalan diatas, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Perlu perencanaan tahunan yang terintegrasi dalam 1 proses bisnis, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DKP Provinsi Jawa Timur dan KKP RI terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten / kota yang perlu disinergikan dalam hal pengusulan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
3. Diperlukan pembinaan terhadap penyuluh perikanan untuk melaksanakan pendampingan pengembangan kelas kelompok sehingga berpengaruh signifikan terhadap proses pencapaian indikator kinerja peningkatan kelas kelompok.

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C. 29.

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025**  
**Kabupaten Pamekasan**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)			
<b>Renstra 2018-2023</b>													
				86,35	(A)								
		<b>1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP										
3	2	1											
	5		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			100	%					
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			100	%					
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur			80	%					
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi			100	%					
3	2	1	2	1									
	5				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD</b>	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			6	Dokumen			

3	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	Dokumen									
3	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	0	Dokumen									
3	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	2	Evaluasi									
3	2	1	2	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>1</b>	<b>Unit Kerja</b>									
3	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan ASN yang disusun/ Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Laporan									
3	2	1	2	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>6</b>	<b>ASN</b>									
3	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	6	PNS									
3	2	1	2	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>5</b>	<b>Sarana</b>									
3	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	Komponen									
3	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Peralatan									
3	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	Bahan									
3	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Barang									

3	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi			34	Aparatur							
3	2	1	2	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>			15	<b>Sarana Aparatur</b>							
3	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan			0	Unit							
3	2	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			11	Unit							
3	2	1	2	8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>			10	<b>Jasa penunjang</b>							
3	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan			7	Layanan							
3	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			18	Orang							
3	2	1	2	9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik negara</b>			9	<b>Sarana &amp; Prasarana</b>							
3	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			2	Unit							
3	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			3	unit							
3	2	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			2	unit							
3	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi			2	unit							
						<b>2. Meningkatkan Produksi Perikanan</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>			1,754	%							
							<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>			4,309	%							



3	2	3	2	4		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan</b>			125	<b>TDKP</b>								
3	2	3	2	4	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah usulan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang terlayani			200	TDKP								
3	2	4				<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan</b>			13,23	%								
							<b>Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas</b>			1	<b>Kelompok</b>								
3	2	4	2	2		<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan kecil yang berdaya</b>			10	<b>Pembudidaya ikan</b>								
3	2	4	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dikembangkan kapasitasnya			75	Pembudidaya ikan								
3	2	4	2	2	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya			10	Kelompok								
3	2	4	2	2	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembudidaya ikan yang difasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha			0	Pembudidaya ikan								
3	2	4	2	2	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			0	Pembudidaya ikan								
3	2	4	2	3		<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan</b>			25	<b>TDPIK</b>								

3	2	4	2	3	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan melalui penerbitan TDPIK			25	TDPIK								
3	2	4	2	4		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang dikelola</b>			3	Sarpras								
3	2	4	2	4	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi budidaya ikan yang mampu disediakan			3	data dan informasi								
3	2	4	2	4	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan penerima prasarana usaha perikanan budidaya			1	pokdakan								
3	2	4	2	4	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan sarana penerima usaha perikanan budidaya			1	pokdakan								
3	2	4	2	4	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah pembudidaya yang dilatih pengelolaan kesehatan ikan dan pokdakan penerima sarana usaha perikanan budidaya			50	Pembudidaya ikan								
							2. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			3.828.599	Ekor								
3	2	5				<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Cakupan pengawaan sumber daya perikanan</b>			75	%								
3	2	5	2	1		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sumber daya perikanan yang diawasi</b>			5	sumber daya perikanan								
3	2	5	2	1	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mampu diawasi			2	usaha								

3	2	5	2	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Jumlah usaha perikanan budidaya yang mampu diawasi			3	usaha								
3	2	5	6			<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Konsumsi Ikan</b>			97,5	%								
							<b>Jumlah Poklhasr Yang Naik Kelas</b>			2	<b>Kelompok</b>								
3	2	5	6	2	1	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah TDUP Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan</b>			12	<b>TDUP</b>								
3	2	5	6	2	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	Data dan Informasi								
3	2	5	6	2	2	<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Jumlah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasilnya</b>			5	<b>Kelompok</b>								
3	2	5	6	2	2	1	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah pelaku usaha Pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibimbing dan penerapan persyaratannya		40	pelaku usaha								
3	2	5	6	2	3	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kab/Kota</b>	<b>Jumlah konsumsi ikan</b>			42,78	<b>Kg/Kpt/Th</b>								
3	2	5	6	2	3	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta penerima manfaat peningkatan konsumsi ikan dan paket produk ikan		200	Peserta								
3	2	5	6	2	3	2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil		3	fasilitas								

Renstra 2024-2026																						
3	2	1					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	87,22	(A)			88,19	(A)	82	(A)	92,98	86,78	(A)	0	0%	
3	2	1	2	1			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	8	Dokumen												
								Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas					6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	3	38%	
3	2	1	2	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen			4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	2	50%	
3	2	1	2	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3	2	Dokumen								0	Dokumen	0	0%	
3	2	1	2	1	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2	Dokumen			2	Laporan	2	Laporan	100	2	Dokumen	1	50%	
3	2	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dengan yang disusun tepat waktu	4	Laporan								4	Laporan	1	25%	
								Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik					1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100					
3	2	1	2	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30	Org/Bln			31	Org/Bln	31	Org/Bln	100	30	Org/Bln	30	100%	
3	2	1	2	5			Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN yang terfasilitasi	5	ASN								6	ASN	0	0%	
3	2	1	2	5	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	Orang								5	Orang	2	33%	
3	2	1	2	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6	Pelayanan												



3	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2	Unit			2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	1	50%
3	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dan perijinannya	3	Unit			3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	1	33%
3	2	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	Unit			3	Unit	3	Unit	100	2	Unit	1	50%
3	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	Unit			2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	0	0%
						<b>2. Meningkatnya Produksi Perikanan</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>					2	%	10,18	%	508,9				
							<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>					4	%	3,07	%	76,81				
							<b>Produksi Perikanan</b>	22.765,99	Ton								22.240,29	Ton	5.855,85	26%
3	2	3				<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	21.591,55	Ton								21.116,43	Ton	5.652,43	26%
							<b>Cakupan Bina Kelompok Nelayan</b>					5	%	5	%	100				
							<b>Jumlah KUB yang naik kelas</b>					3	KUB	3	KUB	100				
3	2	3	2	1		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Cakupan bina kelompok nelayan</b>	6	%								5	%	0	0%
							<b>Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dapat diadakan</b>					2	Sarpras	2	Sarpras	100				
3	2	3	2	1	1	Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan diperairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	0%

3	2	3	2	1	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	0	Unit					0	Unit	0	0%		
3	2	3	2	1	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia				10	Unit	10	Unit	100	0	Unit	0	0%
3	2	3	2	1	4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4	Unit										
3	2	3	2	2		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KUB Yang Naik Kelas</b>	<b>3</b>	<b>Kelompok</b>							<b>2</b>	<b>Kelompok</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
							<b>Jumlah nelayan kecil yang berdaya</b>				<b>50</b>	<b>Nelayan</b>	<b>50</b>	<b>Nelayan</b>	<b>100</b>				
3	2	3	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	60	Nelayan		25	Orang	25	Orang	100	60	Nelayan	0	0%
3	2	3	2	2	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya	12	Kelompok		30	Kelompok	30	Kelompok	100	10	Kelompok	0	0%
3	2	3	2	2	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	200	Unit Usaha		100	Unit Usaha	100	Unit Usaha	100	200	Unit Usaha	0	0%
3	2	3	2	4		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang perikanan tangkap yang usahanya dalam 1 (satu) kab/kota yang diterbitkan</b>	<b>35</b>	<b>Izin Usaha</b>							<b>30</b>	<b>Izin Usaha</b>	<b>5</b>	<b>14%</b>
							<b>Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan</b>				<b>50</b>	<b>TDKP</b>	<b>50</b>	<b>TDKP</b>	<b>100</b>				
3	2	3	2	4	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	75	Rekomendasi		50	Rekomendasi	50	Rekomendasi	100	50	Rekomendasi	10	14%
3	2	4				<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>	<b>1.174,44</b>	<b>Ton</b>							<b>1.123,87</b>	<b>Ton</b>	<b>203,42</b>	<b>17%</b>
							<b>Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan</b>				<b>5</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				
							<b>Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas</b>				<b>2</b>	<b>Pokdakan</b>	<b>2</b>	<b>Pokdakan</b>	<b>100</b>				

3	2	4	2	2		<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Pokdakan yang naik kelas</b>	<b>1</b>	<b>Kelompok</b>						<b>1</b>	<b>Kelompok</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
							<b>Jumlah pembudidaya ikan yang berdaya</b>					<b>20</b>	<b>Pembudidaya Ikan</b>	<b>20</b>	<b>Pembudi daya Ikan</b>	<b>100</b>				
3	2	4	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	7	Kelompok			10	Kelompok	10	Kelompok	100	7	Kelompok	0	0%
3	2	4	2	2	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	5	Kelompok			8	Kelompok	8	Kelompok	100	5	Kelompok	0	0%
3	2	4	2	2	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0	Kelompok			0	Kelompok	0	Kelompok	0	0	Kelompok	0	0%
3	2	4	2	2	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	8	Kelompok			0	Kelompok	0	Kelompok	0	6	Kelompok	0	0%
3	2	4	2	3		<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan</b>	<b>31</b>	<b>Izin Usaha</b>								<b>24</b>	<b>Izin Usaha</b>	<b>5</b>	<b>16%</b>
							<b>Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan</b>					<b>15</b>	<b>TDPIK</b>	<b>15</b>	<b>TDPIK</b>	<b>100</b>				
3	2	4	2	3	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan	25	Rekomen dasi							25	Rekomen dasi	5	20%	

										15	Rekome ndasi	15	Rekomen dasi	100						
3	2	4	2	4											4	%	0	0%		
										2	Sarpras Budida ya	2	Sarpras Budidaya	100						
3	2	4	2	4	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1	Dokumen			1	Dokum en	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	0%
3	2	4	2	4	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0	Unit			0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0%
3	2	4	2	4	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0	Unit			4	Unit	4	Unit	100	0	Unit	0	0%
3	2	4	2	4	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1	Dokumen			1	Dokum en	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	0%
3	2	5				<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Cakupan wilayah potensi perikanan yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan</b>	92	%			75	%	75	%	100	77	%	0	0%
3	2	5	2	1		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota</b>	<b>Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan</b>	12	Wilayah								10	Wilayah	0	0%
							<b>Jumlah sumber daya perikanan yang diawasi</b>					2	Sumbe rdaya Perika nan	2	Sumberd aya Perikana n	100				

3	2	5	2	1	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahana dalam kabupaten/kota				1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	0%	
3	2	5	2	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumberdaya pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahana dalam kabupaten/kota				1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	0%	
3	2	5	2	1	4	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20	Pelaku Usaha											
3	2	5	2	1	7	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	40	Pelaku Usaha											
3	2	5	6			<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Konsumsi Ikan</b>	66,22	Kg/kpt/th			100	%	100	%	100	65,25	Kg/kpt/th	0	0%
							<b>Jumlah produksi ikan olahan</b>	5.605,22	Ton					5.522,39	Ton	0	0%			
							<b>Jumlah Poklhasr Yang Naik Kelas</b>				2	Poklhasr	2	Poklhasr	100					
3	2	5	6	2	1	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklhasr yang naik kelas</b>	1	Kelompok							1	Kelompok	0	0%	
							<b>Jumlah TDUP Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan</b>				10	TDUP	10	TDUP	100					

3	2	6	2	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	0%
3	2	6	2	2		<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan &amp; Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklaksar skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasilnya</b>	<b>6</b>	<b>Kelompok</b>			<b>5</b>	<b>Kelompok</b>	<b>5</b>	<b>Kelompok</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>Kelompok</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3	2	6	2	2	1	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko					5	Unit Usaha	5	Unit Usaha	100	10	Unit Usaha	0	0%
3	2	6	2	2	2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	Unit Usaha											
3	2	6	2	3		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kab/Kota</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia / disalurkan</b>	<b>2</b>	<b>Bahan</b>								<b>2</b>	<b>Bahan</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
							<b>Jumlah konsumsi ikan</b>					44	Kg/Kpt/Th	44	Kg/Kpt/Th	100				
3	2	6	2	3	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten/kota	102	Ton			60	Ton	60	Ton	100	88	Ton	24	24%

3	2	6	2	3	2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50	Pelaku Usaha								0	Pelaku Usaha	0	0%
---	---	---	---	---	---	--	---	----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	---	----

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, perlu suatu tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang terukur dan mampu merepresentasikan keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan menetapkan sasaran sebagai bentuk layanan perangkat daerah. Sasaran ini bersifat spesifik, dapat diukur dan dicapai yaitu : meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing dan meningkatnya AKIP perangkat daerah

Adapun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan pada tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n) dan tahun depan (n+1) sebagaimana yang disajikan pada tabel T-C. 30. Dari tabel tersebut dapat digambarkan capaian kinerja Dinas telah mencapai setiap target yang telah ditentukan dengan indikator sasaran kinerja berupa persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, persentase peningkatan produksi perikanan budidaya serta indikator kinerja kunci yaitu jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota.

Tabel T-C. 30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
IKK Outcome											
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota		v	21.977,61 Ton	22.240,29 Ton	22.765,99 Ton	23.364,50 Ton	23.923,32 Ton	Dalam Proses	22.765,99 Ton	23.364,50 Ton	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
IKK Output											
Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha		v	50 RTP	25 RTP	30 RTP	35 RTP	25 RTP	Dalam Proses	30 RTP	35 RTP	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		v	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dalam Proses	100 %	100 %	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		v	50 TDPIK	24 IUP	31 IUP	36 IUP	51 IUP	Dalam Proses	31 IUP	36 IUP	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		v	250 Pembudi daya ikan	222 Pembudi daya Ikan	232 Pembudi daya Ikan	242 Pembudi daya Ikan	124 Pembudi daya Ikan	Dalam Proses	232 Pembudi daya Ikan	242 Pembudi daya Ikan	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		v	3.605.497 Ekor	7.002.098 Ekor	7.019.011 Ekor	7.299.775 Ekor	7.132.643 Ekor	Dalam Proses	7.019.011 Ekor	7.299.775 Ekor	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhir tahun

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan memunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan yang menjadi kewenang kabupaten;
2. Perumusan kebijakan, pengelolaan, dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, dan penguatan daya saing serta pelayanan dan pengawasan perikanan sesuai dengan kewenagan kabupaten;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
5. Pengelolaan dan penyelenggaraan UPTD;
6. Penyelenggaraan administrasi perizinan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tercapai/ Tidak Tercapai
IKK Outcome		v			
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota			22.240,29 Ton	Dalam Proses	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
IKK Output		v			
Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha		v	25 RTP	Dalam Proses	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		v	100 %	Dalam Proses	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		v	24 IUP	Dalam Proses	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		v	222 Pembudi daya Ikan	Dalam Proses	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun
Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		v	7.002.098 Ekor	Dalam Proses	Laporan hasil evaluasi keluar pada akhri tahun

### 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tugas dan fungsinya di sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, maka dipetakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan</li> <li>2. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan</li> <li>3. Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif</li> <li>4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.</li> </ol>
2.	SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang kurang mandiri dan berdaya saing	Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan</li> <li>2. Keterbatasan pelaku usaha perikanan untuk mengakses layanan permodalan</li> <li>3. Sebagian besar kelas kelompok pelaku usaha perikanan merupakan pemula</li> </ol>

Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan ini, pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, dimana pada tujuan ke-2 adalah meningkatkan kecukupan gizi, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan) yang dapat diidentifikasi dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan melalui sasaran nasional adalah meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 dan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/pertahun sesuai target RPJMN tahun 2019. Estimasi Angka konsumsi ikan Kabupaten Pamekasan tahun 2023 mencapai sekitar 66,42 kg/kapita.

### **2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional**

Sesuai berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan tahun 2024-2026, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan tujuan “*meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat*” dan sasaran “*meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah*”.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 4.1. Untuk merealisasikan tujuan serta sasaran RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

- Tujuan Dinas Perikanan di Renstra Tahun 2024-2026 : Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan
- Sasaran Dinas Perikanan di renstra 2024-2026 :
  1. Meningkatnya produksi perikanan

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah, karena terbatasnya kemampuan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca.
3. Masih kurangnya sarana penangkapan ikan bagi nelayan.
4. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah
5. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan masih banyak yang belum

menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.

6. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan komersil yang tidak diikuti dengan naiknya nilai harga ikan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan.

Sehingga peluang yang dapat dilakukan Dinas Perikanan untuk mengatasi tantangan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Pengembangan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Penambahan pemberian bantuan sarana dan prasarana meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan DAK.
4. Pelatihan dan sosialisasi/edukasi bagi pelaku usaha perikanan.
5. Pelatihan keterampilan nelayan, pelatihan penggunaan alat tangkap, melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar, Cara Pembenihan Ikan Yang Benar (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).
6. Sosialisasi pembudidaya agar mengikuti Gerakan Pakan Mandiri.
7. Fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/ pembudidaya ikan.

### **2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025**

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah :

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan
2. Belum optimalnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Belum optimalnya SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terutama dalam pencapaian indikator sasaran RPD Kabupaten yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan. Dinas Perikanan berperan aktif untuk mencapai indikator tersebut melalui Indikator Kinerja Utama Dinas “Meningkatnya Produksi Perikanan”.
2. Selain dukungan dari dana APBD Kabupaten, indikator sasaran dinas juga didukung dari dana DAK, APBD provinsi dan APBN terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain :
  - Kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap berupa kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil antara lain : bantuan hibah alat bantu penangkapan ikan yaitu mesin kapal perikanan.
  - Peningkatan produksi perikanan budidaya juga didukung dari kegiatan pemberian paket bantuan budidaya sarana dan prasarana budidaya ikan (kolam ikan, pakan mandiri dan obat ikan) dan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan budidaya.

Sedangkan dari APBD Provinsi berupa paket bantuan sarana kolam keluarga budidaya air tawar.

- Peningkatan produksi perikanan juga didukung melalui kegiatan bantuan paket hibah sarana pengolahan hasil perikanan.
- Peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan didukung melalui pendampingan/pembinaan yang terprogram oleh penyuluh perikanan, baik PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) serta pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok. Kegiatan yang mendukung pencapaian peningkatan kelas kelompok diantaranya pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- Fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Pamekasan**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5.028.736.616					8.817.629.531	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Nilai SAKIP	87,22	4.555.236.616	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Nilai SAKIP	87,22	4.693.933.873	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	55.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	55.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	4 Dokumen	27.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	4 Dokumen	27.500.000	Sesuai
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	2 Laporan	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	2 Laporan	12.500.000	Sesuai
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	2 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	2 Laporan	15.000.000	Sesuai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Laporan Keuangan dengan yang Disusun Tepat Waktu	4 Laporan	3.890.736.616	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Laporan Keuangan dengan yang Disusun Tepat Waktu	4 Laporan	3.679.629.531	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.890.736.616	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.679.629.531	Sesuai

3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>5 ASN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>5 ASN</b>	<b>20.000.000</b>	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20.000.000	Sesuai
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi perkantorani</b>	<b>6 Pelayanan</b>	<b>99.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi perkantorani</b>	<b>6 Pelayanan</b>	<b>97.000.000</b>	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Sesuai
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	Sesuai
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	Sesuai
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	Sesuai
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	68.000.000	Sesuai
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>	<b>3 Sarana Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>	<b>3 Sarana Aparatur</b>	<b>65.000.000</b>	
11	Pengadaan Mebel	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah unit mebeuler yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah unit mebeuler yang disediakan	0 Unit	0	Sesuai
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.000.000	Sesuai

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	2 jasa penunjang	357.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	2 jasa penunjang	364.500.000	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan listrik disediakan	5 Laporan	87.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan listrik disediakan	5 Laporan	87.500.000	Sesuai
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 Laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 Laporan	277.000.000	Sesuai
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	9 Sarpras	133.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	9 Sarpras	153.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35.000.000	Sesuai
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	55.000.000	Sesuai
17	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	6.500.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	6.500.000	Sesuai

18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	56.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	56.500.000	Sesuai
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>21.591,55 Ton</b>	<b>161.500.000</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>21.591,55 Ton</b>	<b>2.086.500.000</b>	
8	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok nelayan	6%	11.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok nelayan	6%	11.000.000	
19	Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	11.000.000	Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	11.000.000	Sesuai
20	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0	Sesuai
21	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 Unit	0	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 Unit	0	Tidak Sesuai
<b>9</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah KUB Yang Naik Kelas</b>	<b>3 Kelompok</b>	<b>142.500.000</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah KUB Yang Naik Kelas</b>	<b>3 Kelompok</b>	<b>2.042.500.000</b>	
22	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Nelayan	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	750 Nelayan	2.000.000.000	Sesuai
23	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12 Kelompok	15.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12 Kelompok	15.000.000	Sesuai

24	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	200 Unit Usaha	27.500.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	200 Unit Usaha	27.500.000	Sesuai
10	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah izin usaha bidang perikanan tangkap yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan	35 Izin Usaha	8.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah izin usaha bidang perikanan tangkap yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan	35 Izin Usaha	33.000.000	
25	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	75 Rekomendasi	8.000.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	75 Rekomendasi	33.000.000	Sesuai
C	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.174,44 Ton	204.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.174,44 Ton	2.084.000.000	
11	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokdakan yang naik kelas	1 Kelompok	132.500.000	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokdakan yang naik kelas	1 Kelompok	2.012.500.000	
26	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	100.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	1.800.000.000	Sesuai
27	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	11.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	12.500.000	Sesuai

28	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8 Kelompok	21.500.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	200.000.000	Sesuai
12	<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan</b>	<b>31 Izin Usaha</b>	<b>8.000.000</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan</b>	<b>31 Izin Usaha</b>	<b>8.000.000</b>	
29	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Rekomendasi	8.000.000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Rekomendasi	8.000.000	Sesuai
13	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan kecil</b>	<b>5%</b>	<b>63.500.000</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan kecil</b>	<b>5%</b>	<b>63.500.000</b>	
30	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.000.000	Sesuai
31	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Sesuai
32	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Sesuai

33	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	52.500.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	52.500.000	Sesuai
D	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Wilayah Potensi Perikanan yang dilakukan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	92%	25.000.000	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pengawasan sumber daya perikanan	75%	25.000.000	
14	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	12 wilayah	25.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	12 wilayah	25.000.000	
34	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	12.500.000	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	12.500.000	Tidak Sesuai
35	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	40 Pelaku Usaha	12.500.000	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	40 Pelaku Usaha	12.500.000	Tidak Sesuai
E	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Konsumsi Ikan	66,22 Kg/Kpt/Thn	50.000.000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Konsumsi Ikan	66,22 Kg/Kpt/Thn	155.000.000	
			Jumlah Produksi Ikan Olahan	5.605,22 Ton	33.000.000			Jumlah Produksi Ikan Olahan	5.605,22 Ton	33.000.000	
15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah poklhasr yang naik kelas	1 kelompok	11.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah TDUP Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan	25 TDUP	11.000.000	

36	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	11.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Data dan Informasi	11.000.000	Sesuai
16	<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah poklhasr skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasilnya</b>	<b>6 Kelompok</b>	<b>22.000.000</b>	<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah poklhasr skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasilnya</b>	<b>6 Kelompok</b>	<b>22.000.000</b>	
37	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	22.000.000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	22.000.000	Sesuai
17	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia / disalurkan</b>	<b>2 Bahan Baku</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia / disalurkan</b>	<b>2 Bahan Baku</b>	<b>155.000.000</b>	
38	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102 Ton	50.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102 Ton	155.000.000	Sesuai
39	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	0	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	0	Tidak Sesuai

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perikanan sepanjang anggaran mampu mengakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada tahun 2025, usulan masyarakat melalui SIPD yang ditujukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tidak ada usulan. Usulan masyarakat ini setidaknya mencerminkan harapan masyarakat terhadap pembangunan perikanan. Hal ini sejalan dengan uraian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang mengarahkan pada pengembangan potensi budidaya perikanan dan perikanan tangkap untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesempatan kerja, meningkatkan ketahanan pangan dan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2025 yang ditujukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur beserta tanggapannya melalui SIPD disajikan pada tabel T-C.32.

**Tabel T-C. 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Pamekasan**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	21.591,55 Ton	
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok nelayan	6%	
1	Bantuan Hibah Alat Tangkap Perikanan (Alat Tangkap Reguler, Ramah Lingkungan, Perahu, Mesin Boat, Gps Fish Finder, Dst)	Dusun Sumberwulan, Desa Tanjung, Kec. Pademawu	Jumlah paket bantuan hibah alat tangkap perikanan	1 paket	Usulan telah diverifikasi dan dinyatakan OK. Usulan tersebut dapat dilanjutkan ke Proses Verifikasi selanjutnya di tingkat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan berhak untuk melakukan verifikasi ulang terhadap usulan tersebut
		Dusun Duko, Desa Tanjung, Kec. Pademawu		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan dinyatakan OK. Usulan tersebut dapat dilanjutkan ke Proses Verifikasi selanjutnya di tingkat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan berhak untuk melakukan verifikasi ulang terhadap usulan tersebut
		Dusun Asam Batur, Desa Padelegan, Kec. Pademawu		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Dusun Dajah Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
		Dusun Muarah, Desa Padelegan, Kec. Pademawu		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
		Dusun Candi Utara, Desa Polagan, Kec. Galis		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
		Dusun Tambak, Desa Kaduara Barat, Kec. Larangan		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
		Dusun Togur Dajah, Desa Sotabar, Kec. Pasean		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
		Dusun Nunggunung, Desa Pagagan, Kec. Pademawu		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
		Dusun lebak barat, Desa Sotabar, Kec. Pasean		1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
2	Bantuan Hibah Rumah Ikan / Underwater Restocking	Dusun Tabugah, Desa Montok, Kec. Larangan	Jumlah bantuan hibah Rumah Ikan / Underwater Restocking	1 paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Dusun Arombasan, Desa Tanjung, Kec. Pademawu	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	-	Verifikasi Kecamatan
		Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kec. Pademawu		-	Verifikasi Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Dusun Pacanan, Desa Montok, Kec. Larangan			Pengajuan Usulan
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah KUB Yang Naik Kelas</b>	<b>3 Kelompok</b>	
1	Pembentukan Kelembagaan, Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Desa Pagagan. Kec. Pademawu	Jumlah Nelayan Kecil yang mengikuti pembentukan, pembinaan, dan pengembangan Kapasitasnya	-	Validasi Mitra Bappeda
2	Bantuan Program Bimtek / Pelatihan / Pembinaan Nelayan (Perbaikan Mesin Kapal, Fasilitasi Sehat Nelayan, Sosialisasi Asuransi Nelayan, Diversifikasi Usaha Wanita Nelayan, Diversifikasi Alat Tangkap Taruna Nelayan, Pembuatan Alat Tangkap Gillnet Millenium, Pembuatan Perahu, Pembinaan Kub Nelayan, Alat Tangkap Ramah Lingkungan)	Dusun Biyan barat, Biyan tengah dan tambak desa, Desa Kaduara Barat, Kec. Larangan	Jumlah bantuan program bimtek / pelatihan / pembinaan nelayan	-	Pengajuan Usulan
		Desa Branta Pesisir, Kec. Tlanakan			Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
3	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Melalui Bantuan Sarana Usaha Kenelayanan	KUB Kartini	Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	22 Buah API	Usulan telah diterima
		KUB Bunga Mutiara	Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	9 Unit Webbing	Usulan telah diterima

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		KUB Citra Nelayan Tanjung	Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	250 Pack Harnet	Usulan telah diterima
		KUB Giilnet Sumber Rejeki	Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	9 Pcs Webbing	Usulan telah diterima
		KUB Mina Laut	Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	90 Pcs Webbing	Usulan telah diterima
		KUB Nelayan Kecil	Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	15 Pcs	Usulan telah diterima
			Jumlah bantuan sarana usaha kenelayanan yang tersedia	425 Pack	Usulan telah diterima
4	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Melalui Bantuan Hibah Sarana Usaha Kenelayanan	KUB Bintang Samudera	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	10 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Kakap Merah Tamberu	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	9 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Kerapu Mas Tamberu	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	8 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Mutiara Laut Pagagan	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	15 Unit	Usulan telah diterima

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		KUB Perahu Mas	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	10 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Petik Laut Jarin	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	16 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Barokah Laut Kaduara Barat	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Bunga Genta	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Harapan Jaya Utama Tlonto Raja	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Ikan Teri Putih	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Kakap	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	4 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Nelayan Lautan Makmur	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Padhe Seneng	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	4 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Padi Jaya Pantura Tlonto Raja	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Potre Koneng	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Putra Singa Laut Pagagan	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	4 Unit	Usulan telah diterima

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		KUB Sumber Makmur	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Sumber Segara Kaduara Barat	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Tambak Harapan	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	2 Unit	Usulan telah diterima
		KUB Tengiri Satu	Jumlah bantuan hibah sarana usaha kenelayanan	4 Unit	Usulan telah diterima
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1.174,44 Ton</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan kecil</b>	<b>5%</b>	
1	Bantuan Program Peralatan Dan Bahan Uji Pengukuran Kualitas Air	Desa Larangan Badung, Kec. Palengaan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 paket	Pengajuan Usulan
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah Pokdakan yang naik kelas</b>	<b>1 Kelompok</b>	
1	Bantuan Program Budidaya Air Payau / Laut (Benih Dan Peralatan Produksi : Bandeng, Kerapu, Lobster, Rumput Laut, Udang Dst)	Desa Ambat, Kec. Tlanakan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti pengembangan kapasitas	-	Pengajuan Usulan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Dusun Pandian, Desa Ponteh, Kec. Galis		-	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
		Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan			Pengajuan Usulan
		Dusun Lembanah, Desa Kaduara Barat, Kec. Larangan			Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
2	Bantuan Hibah Peralatan Produksi Garam Rakyat (Geomembran, Tunnel, Dst)	Dusun Bangkal, Desa Lembung, Kec. Galis	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	Usulan telah diverifikasi dan dinyatakan OK. Usulan tersebut dapat dilanjutkan ke Proses Verifikasi selanjutnya di tingkat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan berhak untuk melakukan verifikasi ulang terhadap usulan tersebut
		Dusun Muarah, Desa Padelegan, Kec. Pademawu			Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
		Dusun Muarah, Desa Padelegan, Kec. Pademawu			Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
		Dusun Lembung Tengah, Desa Lembung, Kec. Galis			Verifikasi terhenti karena belum melengkapi: Surat Usulan & Proposal kpd Gubernur (ttd Ketua Kelompok), Legalitas Kelompok, RAB (Rencana Anggaran Biaya) & Lokasi. Lengkapi agar verifikasi dapat dilanjutkan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
3	Bantuan Program Pelatihan Garam Rakyat	Dusun Lembang Tengah, Desa Lembang, Kec. Galis	Jumlah paket bantuan program pelatihan garam rakyat	-	Verifikasi terhenti karena belum melengkapi: Surat Usulan & Proposal kpd Gubernur (ttk Ketua Kelompok), Legalitas Kelompok, RAB (Rencana Anggaran Biaya) & Lokasi. Lengkapi agar verifikasi dapat dilanjutkan
4	Bantuan Hibah Peralatan Produksi Garam Rakyat (Geomembran, Tunnel, Dst)	Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pamekasan	Jumlah bantuan hibah peralatan produksi garam yang tersedia	1 Paket	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
		Dusun Candi Selatan, Desa Polagan, Kec. Galis		-	Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
		Dusun Candi Selatan, Desa Polagan, Kec. Galis			Usulan telah diverifikasi dan OK. Lanjut ke jenjang verifikasi selanjutnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
<b>C.</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Konsumsi Ikan</b>	<b>66,22 Kg/Kpt/Thn</b>	
			<b>Jumlah produksi ikan olahan</b>	<b>5.605,22 Ton</b>	
<b>1</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia/disalurkan</b>	<b>2 Bahan Baku</b>	
1	Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Desa - pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil perikanan	Desa Konang, Kecamatan galis	Jumlah Pengembangan Ekonomi Lokal Desa - pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil perikanan		Verifikasi terhenti karena belum melengkapi : Surat Usulan KADES ke Gubernur, Proposal, RAB, Lokasi, Identitas, Berita Acara Musdes kegiatan yg diusulkan. Lengkapi agar verifikasi bisa dilanjutkan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu memperhatikan memperhatikan pencapaian visi dan misi pemerintah pusat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memperhatikan pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif nasional serta memahami isu strategis dunia internasional maupun domestik.



Gambar 3.1.1 Arah Kebijakan RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 bertema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. maka arah kebijakan RKP Tahun 2025 mengusung 3 (tiga) prioritas utama yaitu SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk melaksanakan tema pembangunan tersebut, ditetapkan 6 program prioritas nasional yaitu :

1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

5. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6. Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Tema pembangunan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah *“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”*. Tema tersebut kemudian diderivasikan ke dalam 5 tujuan dan 19 sasaran pembangunan pada tahun 2025.



Gambar 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Timur 2025

Lebih lanjut, dilakukan langkah-langkah konkret dari tujuan dan sasaran dalam RKPD melalui program prioritas pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi.
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan.
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan.

5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, berbudi pekerti luhur dan berintegritas.
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan.
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, Koperasi, MUM Desa, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi.
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan pada hasil evaluasi pencapaian pembangunan pada tahun sebelumnya maka dapat diketahui sasaran prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas untuk mewujudkan tema pembangunan *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Kualitas dan Pemerataan SDM yang Berkarakter serta Peningkatan Kebutuhan Sosial Dasar serta Tatahan Masyarakat yang Tertib, Toleran, dan Harmonis"*. Penjabaran pokok-pokok Tema RKPD Kabupaten Pamekasan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diturunkan ke dalam Prioritas Pembangunan tahunan secara lebih operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025

NO	POKOK TEMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1. Peningkatan produksi pertanian yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah (Value Added) petani 2. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Sektor Ekonomi Kreatif yang berorientasi pada penyerapan pengangguran
2	Pembangunan Berkelanjutan	3. Perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
3	Penguatan Kualitas SDM yang Berkarakter	4. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang diorientasikan pada pembentukan manusia berakhlak, unggul dan berdaya saing serta penurunan AKI-AKB
4	Peningkatan Kualitas Layanan Sosial	5. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui integrasi program lintas sektor

	Dasar	(Cross Cutting Program) secara efektif dan tepat sasaran
5	Peningkatan ketertiban, toleransi dan harmonisasi dalam pembangunan	6. Internalisasi nilai-nilai toleransi dan harmonisasi serta edukasi mengenai regulasi yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat
6	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik*	7. Peningkatan SDM Aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara merata

Dengan memperhatikan arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan baik nasional maupun provinsi dan daerah, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan berperan aktif mendukung prioritas:

- Prioritas Nasional ke -3 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Prioritas Provinsi ke -1 : Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
- Prioritas Daerah ke -5 : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Integrasi Program Lintas Sektor (*Cross Cutting*) secara efektif dan tepat sasaran.

Identifikasi program nomenklatur Dinas Perikanan yang mendukung tema RKPD adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Adapun upaya yang dilakukan dalam mendukung program prioritas RKPD 2025 melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu optimalisasi produksi dan produktivitas perikanan tangkap, pemberian bantuan hibah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pengembangan kapasitas wanita nelayan melalui pelatihan ecoprint, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Dalam rangka merealisasikan tujuan serta sasaran RPD Kabupaten Pamekasan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Renja tahun 2025 Dinas Perikanan seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3.2 Sasaran Renja Tahun 2025  
Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Baseline Tahun 2023	Target Tahun 2025	Penyesuaian Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	$r = \frac{Y_t - Y_{(t-1)}}{Y_{(t-1)}}$ $r = \text{Laju (\%)}$ $Y_t = \text{PDRB tahun } t$ $Y_{t-1} = \text{PDRB tahun sebelumnya}$	2,52 %*	9,05 %	-
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota}}{\text{Target Produksi yang Ditetapkan}} \times 100 \%$	23.923,24 Ton	22.765,99 Ton	-

\*Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Realisasi Persentase pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Target yang ditetapkan Tahun 2025, namun target Indikator Sasaran Produksi Perikanan Tahun 2025 tidak dilakukan penyesuaian dikarenakan produksi perikanan setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu. Dampak perubahan iklim terhadap kegiatan penangkapan ikan adalah meningkatnya gelombang besar yang menghalangi nelayan mencapai daerah penangkapan ikan.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten.

Sebagai implementasi strategi, setelah penetapan kebijakan dan program adalah perumusan dan penetapan kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perumusan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Tahun 2024.
2. Pencapaian IKU Dinas Perikanan Tahun 2024.
3. Prioritas pengembangan bidang perikanan yang diwujudkan dalam kegiatan/sub kegiatan.

Selanjutnya mempertimbangkan juga kontribusi terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan tupoksi Dinas Perikanan yaitu tujuan 2 (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan) yang dapat diidentifikasi dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan melalui sasaran nasional adalah meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 dan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun sesuai target RPJMN tahun 2019. Angka konsumsi ikan Kabupaten Pamekasan tahun 2022 mencapai sekitar 64,42 kg/kapita/tahun.

Berdasarkan perencanaan tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan tahun 2025 mengacu pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI dengan anggaran sebesar Rp. 5.028.736.616 untuk mendukung 5 (lima) program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar 4.555.236.616 dengan rincian 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan pagu anggaran sebesar 161.500.000 dengan rincian 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan pagu anggaran sebesar 204.000.000 dengan rincian 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar 25.000.000 dengan rincian 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pagu anggaran sebesar 83.000.000 dengan rincian 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25					Urusan Kelautan dan Perikanan				8.817.629.531				6.461.433.873
3	25	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	87,22 (A)	4.434.129.531			87,65 (A)	4.833.433.873
3	25	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	8 Dokumen	55.000.000			8 Dokumen	60.000.000
3	25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	4 Dokumen	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	30.000.000
3	25	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Laporan	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	12.500.000
3	25	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	17.500.000
3	25	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dengan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	4 Laporan	3.679.629.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	4.009.433.873
3	25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	30 Orang/bulan	3.679.629.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang/bulan	4.009.433.873
3	25	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	5 ASN	20.000.000			5 ASN	20.000.000

3	25	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	6 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	20.000.000
3	25	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi perkantorani</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>6 Pelayanan</b>	<b>97.000.000</b>			<b>6 sarana</b>	<b>110.500.000</b>
3	25	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.500.000
3	25	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	9.000.000
3	25	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	9.000.000
3	25	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	9.000.000
3	25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	35 Laporan	68.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Laporan	80.000.000
3	25	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>3 Sarana Aparatur</b>	<b>65.000.000</b>			<b>4 Sarana Aparatur</b>	<b>90.000.000</b>
3	25	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeuler yang disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	30.000.000
3	25	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	6 Unit	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	60.000.000
3	25	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>2 jasa penunjang</b>	<b>364.500.000</b>			<b>2 jasa penunjang</b>	<b>363.000.000</b>
3	25	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan listrik disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	5 Laporan	87.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	90.000.000

3	25	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanjasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	18 Laporan	277.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Laporan	273.000.000
3	25	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur</b>	<b>9 Sarpras</b>	<b>153.000.000</b>		<b>9 Sarpras</b>	<b>180.500.000</b>
3	25	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	42.500.000
3	25	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	3 Unit	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	30.000.000
3	25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Unit	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	8.000.000
3	25	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kab. Pamekasan, Pademawu, Barurambat Timur	2 Unit	56.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	100.000.000
03	25	03				<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>21.591,55 Ton</b>	<b>2.086.500.000</b>		<b>22.131,34 Ton</b>	<b>315.000.000</b>
03	25	03	2	01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan bina kelompok nelayan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>6%</b>	<b>11.000.000</b>		<b>7%</b>	<b>12.000.000</b>
03	25	03	2	01	01	Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000
03	25	03	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	0 Unit	0
03	25	03	2	01	04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	0 Unit	0
3	25	03	2	02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KUB Yang Naik Kelas</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>3 Kelompok</b>	<b>2.042.500.000</b>		<b>3 Kelompok</b>	<b>294.000.000</b>

3	25	03	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Nelayan	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65 Nelayan	255.000.000
3	25	03	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kelompok	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Kelompok	12.000.000
3	25	03	2	02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Unit Usaha	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Unit Usaha	27.000.000
3	25	03	2	04		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang perikanan tangkap yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>35 Izin Usaha</b>	<b>33.000.000</b>		<b>40 Izin Usaha</b>	<b>9.000.000</b>
3	25	03	2	04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Rekomendasi	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Rekomendasi	9.000.000
03	25	04				<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>1.174,44 Ton</b>	<b>2.084.000.000</b>		<b>1.233,16 Ton</b>	<b>1.006.000.000</b>
03	25	04	2	02		<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Pokdakan yang naik kelas</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>1 Kelompok</b>	<b>132.500.000</b>		<b>2 Kelompok</b>	<b>790.000.000</b>
03	25	04	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	1.800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Kelompok	755.000.000
03	25	04	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kelompok	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Kelompok	12.000.000
03	25	04	2	02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Kelompok	23.000.000
3	25	04	2	03		<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>31 Izin Usaha</b>	<b>8.000.000</b>		<b>36 Izin Usaha</b>	<b>9.000.000</b>

3	25	04	2	03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Rekomendasi	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 Rekomendasi	9.000.000
3	25	04	2	04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan kecil</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	5%	63.500.000		6%	207.000.000
3	25	04	2	04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12.000.000
3	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	0 Unit	0
3	25	04	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	2 Unit	140.000.000
3	25	04	2	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	52.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	55.000.000
3	25	05				<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Cakupan Wilayah Potensi Perikanan yang dilakukan Pengawasan Sumberdaya Perikanan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	92%	25.000.000		75%	70.000.000
3	25	05	2	01		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	12 wilayah	25.000.000		13 wilayah	70.000.000
3	25	05	2	01	04	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Pelaku Usaha	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Pelaku Usaha	20.000.000
3	25	05	2	01	07	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Pelaku Usaha	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Pelaku Usaha	50.000.000
3	25	06				<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Konsumsi Ikan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	66,22 Kg/Kpt/Thn	155.000.000		67,55 Kg/Kpt/Thn	200.000.000

							<b>Jumlah Produksi Ikan Olahan</b>		<b>5.605,22 Ton</b>	<b>33.000.000</b>			<b>5.703,31Ton</b>	<b>37.000.000</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklhasar yang naik kelas</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>1 kelompok</b>	<b>11.000.000</b>			<b>2 kelompok</b>	<b>12.000.000</b>
3	25	06	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.000.000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>	<b>Jumlah poklhasar skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasilnya</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>6 Kelompok</b>	<b>22.000.000</b>			<b>7 Kelompok</b>	<b>25.000.000</b>
3	25	06	2	02	02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit Usaha	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit Usaha	25.000.000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>06</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia / disalurkan</b>	<b>Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>2 Bahan Baku</b>	<b>155.000.000</b>			<b>2 Bahan Baku</b>	<b>200.000.000</b>
3	25	06	2	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102 Ton	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		118 Ton	50.000.000
3	25	06	2	03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Pelaku Usaha	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Pelaku Usaha	150.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rumusan rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan per triwulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tercantum pada tabel 4.1

Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 serta reviu Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2025	
									Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1						2	3	4	5		6		7		8		9	
3	2					<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>				1.261.488.07 3		1.519.601.88 5		4.980.455.53 0		1.056.084.04 3		8.817.629.53 1
3	2	1				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota</b>	Nilai SAKIP	Point		1.186.346.47 3		1.282.819.68 5	87,22 (A)	1.047.548.93 0		917.414.443	87,22 (A)	4.434.129.53 1
3	2	1	2	1		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu</b>	Dokumen	4	5.292.500	1	20.787.400	3	18.136.100	0	10.784.000	8	55.000.000
3	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	2	5.292.500	1	6.636.000	1	7.287.500	0	8.284.000	4	27.500.000
3	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	2	-	0	8.375.200	0	4.124.800	0	-	2	12.500.000
3	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	0	-	0	5.776.200	2	6.723.800	0	2.500.000	2	15.000.000
3	2	1	2	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan dengan yang Disusun Tepat Waktu</b>	Laporan	1	1.051.322.72 3	1	1.051.322.72 3	1	788.492.042	1	788.492.043	4	3.679.629.53 1

3	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	30	1.051.322.723	30	1.051.322.723	30	788.492.042	30	788.492.043	30	3.679.629.531
3	2	1	2	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	ASN	2	8.330.000	1	6.670.000	1	5.000.000	1	-	5	20.000.000
3	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	8.330.000	1	6.670.000	1	5.000.000	2	0	6	20.000.000
3	2	1	2	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi perkantorani</b>	Pelayanan	1	22.859.250	2	37.640.750	1	24.000.000	2	12.500.000	6	97.000.000
3	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	2.500.000	1	0	0	2.500.000	1	5.000.000
3	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	3.509.950	1	3.490.050	1	1.000.000	0	0	2	8.000.000
3	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	4.000.000	1	4.000.000	0	0	1	0	2	8.000.000
3	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.849.300	2	4.150.700	2	0	2	0	8	8.000.000
3	2	1	2	6	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	11.500.000	7	23.500.000	13	23.000.000	10	10.000.000	35	68.000.000
3	2	1	2	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi</b>	Sarana Aparatur	0	0	1	28.226.412	2	36.773.588	0	0	3	65.000.000
3	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeuler yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	2	28.226.412	4	36.773.588	0	0	6	65.000.000

							yang Disediakan												
3	2 5	1	2	8			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>Jasa Penunjang</b>	<b>0</b>	<b>86.542.000</b>	<b>1</b>	<b>99.172.400</b>	<b>0</b>	<b>93.147.200</b>	<b>1</b>	<b>85.638.400</b>	<b>2</b>	<b>364.500.000</b>
3	2 5	1	2	8	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan listrik disediakan	Laporan	1	23.692.000	1	21.822.400	1	23.147.200	2	18.838.400	5	87.500.000
3	2 5	1	2	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	18	62.850.000	18	77.350.000	18	70.000.000	18	66.800.000	18	277.000.000
3	2 5	1	2	9			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>Sarpras</b>	<b>2</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2</b>	<b>39.000.000</b>	<b>3</b>	<b>82.000.000</b>	<b>2</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9</b>	<b>153.000.000</b>
3	2 5	1	2	9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	5.000.000	0	19.000.000	1	11.000.000	0	0	2	35.000.000
3	2 5	1	2	9	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000	0	17.000.000	1	13.000.000	1	20.000.000	3	55.000.000
3	2 5	1	2	9	0		Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	0	3.000.000	1	1.500.000	0	-	2	6.500.000
3	2 5	1	2	9	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	0	-	1	-	1	56.500.000	0	-	2	56.500.000

							Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi												
3	2	3					<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>6.127,56</b>	<b>21.918.600</b>	<b>5.284,13</b>	<b>43.864.100</b>	<b>5.147,74</b>	<b>1.962.656.600</b>	<b>5.032,12</b>	<b>58.060.700</b>	<b>21.591,55</b>	<b>2.086.500.000</b>
3	2	3	2	1			<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Cakupan bina kelompok nelayan</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>4.563.000</b>	<b>0</b>	<b>4.153.000</b>	<b>6</b>	<b>2.284.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>11.000.000</b>
3	2	3	2	1	1		Penyediaan data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	0	4.563.000	0	4.153.000	0	2.284.000	1	-	1	11.000.000
3	2	3	2	1	2		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
3	2	3	2	1	4		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	0	-	0	-	4	-	0	-	4	0
3	2	3	2	2			<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KUB Yang Naik Kelas</b>	<b>Kelompok</b>	<b>0</b>	<b>5.669.400</b>	<b>0</b>	<b>28.380.800</b>	<b>3</b>	<b>1.952.049.800</b>	<b>0</b>	<b>56.400.000</b>	<b>3</b>	<b>2.042.500.000</b>
3	2	3	2	2	0		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Nelayan	0	1.634.200	0		750	1.941.965.800	0	56.400.000	750	2.000.000.000
3	2	3	2	2	2		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	0	-	0	10.000.000	10	5.000.000	0	-	10	15.000.000
3	2	3	2	2	3		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	4.035.200	0	18.380.800	200	5.084.000	0	-	200	27.500.000

3	2 5	3	2	4		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang perikanan tangkap yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diterbitkan</b>	<b>Izin Usaha</b>	<b>10</b>	<b>11.686.200</b>	<b>5</b>	<b>11.330.300</b>	<b>10</b>	<b>8.322.800</b>	<b>10</b>	<b>1.660.700</b>	<b>35</b>	<b>33.000.000</b>
3	2 5	3	2	4	0	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	20	11.686.200	20	11.330.300	15	8.322.800	20	1.660.700	75	33.000.000
3	2 5	4				<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>203,42</b>	<b>27.263.600</b>	<b>259,45</b>	<b>124.673.100</b>	<b>318,28</b>	<b>1.905.573.000</b>	<b>393,29</b>	<b>26.490.300</b>	<b>1.174,44</b>	<b>2.084.000.000</b>
3	2 5	4	2	2		<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Pokdakan yang naik kelas</b>	<b>Kelompok</b>	<b>0</b>	<b>4.458.200</b>	<b>0</b>	<b>112.767.400</b>	<b>1</b>	<b>1.886.794.000</b>	<b>0</b>	<b>8.480.400</b>	<b>1</b>	<b>2.012.500.000</b>
3	2 5	4	2	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	0		0	92.875.000	10	1.707.125.000	0		10	1.800.000.000
3	2 5	4	2	2	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	0	2.988.600	0	2.392.400	5	5.619.000	0	1.500.000	5	12.500.000
3	2 5	4	2	2	0	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	0	1.469.600	8	17.500.000	2	174.050.000	0	6.980.400	10	200.000.000
3	2 5	4	2	3		<b>Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu)</b>	<b>Izin Usaha</b>	<b>5</b>	<b>1.724.100</b>	<b>6</b>	<b>1.740.700</b>	<b>10</b>	<b>2.237.000</b>	<b>10</b>	<b>2.298.200</b>	<b>31</b>	<b>8.000.000</b>



3	2 5	5	2	1	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan sumberdaya perikanan	Wilayah	3	4.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	5.500.000	12	25.000.000
3	2 5	5	2	1	4	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	2.500.000	5	4.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	20	12.500.000
3	2 5	5	2	1	7	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	2.000.000	10	3.500.000	10	4.500.000	10	2.500.000	40	12.500.000
3	2 5	6				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Th n	0	16.604.400	0	53.900.000	0	51.327.000	66,22	44.168.600	66,22	166.000.000
							Jumlah Produksi Ikan Olahahan	Ton	1.401,3 1	4.855.000	1.401,3 1	6.845.000	1.401,3 1	5.850.000	1.401,3 1	4.450.000	5.605,22	22.000.000
3	2 5	6	2	1	1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklhasar yang naik kelas	Kelompok	0	1.604.400	0	3.900.000	1	1.327.000	0	4.168.600	1	11.000.000
3	2 5	6	2	1	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	0	1.604.400	0	3.900.000	0	1.327.000	1	4.168.600	1	11.000.000
3	2 5	6	2	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasar skala mikro dan kecil yang dibina mutu dan keamanan hasilnya	Kelompok	0	4.855.000	0	6.845.000	6	5.850.000	0	4.450.000	6	22.000.000

3	2 5	6	2	2	2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	0	4.855.000	0	6.845.000	15	5.850.000	0	4.450.000	15	22.000.000
3	2 5	6	2	3		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan yang tersedia / disalurkan</b>	<b>Bahan Baku</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2</b>	<b>155.000.000</b>
3	2 5	6	2	3	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	25,5	15.000.000	25,5	50.000.000	25,5	50.000.000	25,5	40.000.000	102	155.000.000
3	2 5	6	2	3	0	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	0	-	0	-	50	-	0	-	50	0

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

#### **5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

1. Perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perikanan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026;
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan mengacu pada RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan mengacu pada Renstra Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

## **5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

1. Rencana Kerja Dinas Perikanan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan mengikuti adanya perubahan RKPD Tahun 2025;

## **5.3. Rencana tindak lanjut**

Rencana Tindak lanjut terhadap Catatan penting dan kaidah pelaksanaan, jika terjadi perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten**  
**Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan**  
**Periode Pelaksanaan 2023**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												k	Rp	k
5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18							
<b>DINAS PERIKANAN</b>																															
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100		100		100		57		29		14		0		100		100%		200		200%							
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	4.499.307,98,00	100	6.904.913.408,00	100	3.996.552.824,00	25	609.999.501,00	25	1.133.626.805,00	25	974.351.328,00	25	1.011.452.858,00	100	3.729.430,492,00	100%	93,32%	200		106.343.439,00,00	200%	236,36%	-				
		Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	100		100		100		25		25		25		25		100		100%		200		200%							
03.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	12	135.000,00	6	87.605.750,00	6	27.000,00	3	-	2	7.825.000,00	0	4.058.000,00	1	14.443.500,00	6	26.326,500,00	100%	97,51%	12		113.932.250,00	100%	84,39%	-				
03.25.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	4	50.000,00	4	54.811.050,00	4	15.500,00	2	-	2	2.727.000,00	0	4.058.000,00	0	8.378.500,00	4	15.163,500,00	100%	97,83%	8		69.974,550,00	200%	139,95%	-	karena pemenuhan kelengkapan dokumen untuk penilai internal pemerintah	pemahaman yang belum seragam terhadap pemenuhan dokumen yang dibutuhkan		
03.25.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	Laporan	2	25.000,00	2	14.830.700,00	2	11.500,00	1	-	0	5.098.000,00	0	-	1	6.065.000,00	2	11.163,000,00	100%	97,07%	4		25.993,700,00	200%	103,97%	-	penyesuaian kecepatan evaluasi pembenahan koreksi dan kekurangan dokumen dan kinerja	evaluasi terhadap kinerja dan dokumen yang belum satu persepsi dan pemahaman		

03.25.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	unit kerja	1	3.697.007,98,00	1	5.637.834.929,00	1	3.414.552.824,00	1	540.397.214,00	1	1.014.525.147,00	1	850.283.751,00	1	782.154.958,00	1	3.187.361.070,00	100%	93.35%	2	8.825.195.999,00	200%	238.71%	-		
03.25.01.2.0.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	31	3.697.007,98,00	31	5.637.834.929,00	31	3.414.552.824,00	31	540.397.214,00	31	1.014.525.147,00	31	850.283.751,00	31	782.154.958,00	31	3.187.361.070,00	100%	93.35%	62	8.825.195.999,00	200%	238.71%	-	berisi target yang menjadi kebutuhan rutin setiap bulan	penyesuaian terhadap kebutuhan penganfraan yang dibutuhkan
03.25.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	sarana	6	207.500,00,00	5	171.473.875,00	6	90.000,00,00	2	-	2	13.484.000,00	1	8.516.000,00	1	55.705.000,00	6	77.705.000,00	100%	86.34%	11	249.178.875,00	183.33%	120.09%	-		
03.25.01.2.0.6.0.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	7.500.000,00	5	4.241.000,00	1	2.500,00	0	-	0	-	1	-	0	2.500.000,00	1	2.500,00	100%	100%	6	6.741.000,00	120%	89.88%	-	Pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pergantian komponen	waktu yang tidak ditentukan untuk proses pergantian komponen
03.25.01.2.0.6.0.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000,00,00	3	20.700.000,00	2	7.500,00	1	-	0	-	1	-	0	6.671.000,00	2	6.671.000,00	100%	88.95%	5	27.371.000,00	125%	136.86%	-	Pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pergantian peralatan kantor	waktu yang tidak ditentukan untuk proses pergantian peralatan kantor
03.25.01.2.0.6.0.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	25.000,00,00	2	23.470.500,00	2	7.500,00	1	-	0	-	1	-	0	7.460.000,00	2	7.460,00	100%	99.47%	4	30.930.500,00	200%	123.72%	-	Pemenuhan kebutuhan logistik yang sesuai kebutuhan	waktu yang tidak ditentukan untuk proses pemenuhan logistik kantor
03.25.01.2.0.6.0.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	25.000,00,00	2	18.683.375,00	2	7.500,00	1	-	0	-	1	-	0	7.330.000,00	2	7.330,00	100%	97.73%	4	26.013.375,00	200%	104.05%	-	waktu yang tidak ditentukan untuk proses pemenuhan logistik kantor	waktu yang tidak ditentukan untuk pemenuhan kebutuhan penggandaan dan pencetakan dokumen
03.25.01.2.0.6.0.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	35	100.000,00,00	34	104.379.000,00	30	65.000,00	1	-	8	13.484.000,00	11	8.516.000,00	10	31.744.000,00	30	53.744.000,00	100%	82.68%	64	158.123.000,00	182.86%	158.12%	-	kebutuhan perjalanan dinas yang terjadwal pada setiap kebutuhan koordinasi	waktu yang kurang terjadwal dalam melakukan koordinasi
03.25.01.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	jasa penunjang	10	413.500,00,00	10	605.224.454,00	2	351.500,00,00	2	69.602.287,00	2	88.067.658,00	2	82.244.277,00	2	101.146.000,00	2	341.060.222,00	100%	97.03%	12	946.284.676,00	120%	228.85%	-		

03.25.01.2.0.8.0.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	7	100.000,00	7	129.124.454,00	3	81.500,00	2	11.602.287,00	0	20.367.658,00	1	15.644.277,00	0	26.746.000,00	3	74.360.222,00	100%	91.24%	10	203.484.676,00	142.86%	203.48%	-	penyesuaian kebutuhan keperluan kantor untuk operasional	pengeluaran yang selalu berubah dan tidak sama dengan rencana
03.25.01.2.0.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	20	300.000,00	18	476.100.000,00	18	270.000,00	16	58.000,00	18	67.700.000,00	18	66.600.000,00	18	74.400.000,00	18	266.700.000,00	100%	98.78%	36	742.800.000,00	180%	247.6%	-	target yang sudah ditentukan untuk pengeluaran jasa pelayanan umum	
03.25.01.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	Unit	14	295.000,00	9	282.451.400,00	10	105.500,00	2	-	3	9.725.000,00	3	29.249.300,00	2	58.003.400,00	10	96.977.700,00	100%	91.92%	19	379.429.100,00	135.71%	128.62%	-		
03.25.01.2.0.9.0.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	40.000,00	2	49.161.500,00	2	52.000,00	1	-	0	9.725.000,00	1	16.948.000,00	0	24.394.600,00	2	51.067.600,00	100%	98.21%	4	100.229.100,00	200%	250.57%	-	target yang sudah ditentukan untuk pengeluaran jasa pelayanan umum	Masih Menunggu Pergeseran
03.25.01.2.0.9.0.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	5	40.000,00	3	67.604.400,00	3	25.000,00	0	-	1	-	0	9.201.300,00	2	11.689.800,00	3	20.891.100,00	100%	83.56%	6	88.495.000,00	120%	221.24%	-	kebutuhan yang sesuai dengan rencana	
03.25.01.2.0.9.0.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	3	15.000,00	2	12.817.000,00	3	5.000,00	1	-	0	-	2	3.100.000,00	0	450.000,00	3	3.550.000,00	100%	71%	5	16.367.000,00	166.67%	109.11%	-	kebutuhan pemeliharaan yang tidak menentu	
03.25.01.2.0.9.0.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	200.000,00	2	152.868.500,00	2	23.500,00	0	-	0	-	1	-	1	21.469.000,00	2	21.469.000,00	100%	91.36%	4	174.337.500,00	80%	87.17%	-	kebutuhan pemeliharaan yang tidak menentu	
03.25.01.2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang lavak fungsi	Sarana Aparatur	6	8.000,00	15	82.495.000,00	6	8.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	15	82.495.000,00	250%	103.19%	-	Tidak diverifikasi oleh BPKPD karena di Tahun 2023 tidak boleh ada Belanja Modal	

03.25.01.20.7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	45.000.000,00	11	62.545.000,00	6	8.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	11	62.545.000,00	183.33%	138.99%	-	Tidak diverifikasi oleh BPKPD karena di Tahun 2023 tidak boleh ada Belanja Modal		
3.2.5.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	24	820.000,00	7	573.355.200,00	5	142.000.000,00	0	-	0	-	5	122.400.200,00	0	14.736.100,00	5	137.300,00	100%	96.57%	12	710.491.500,00	50%	86.65%	-	
		Jumlah KUB yang naik kelas	KUB	4	820.000,00	3	573.355.200,00	3	142.000.000,00	0	-	0	-	3	122.400.200,00	0	14.736.100,00	3	137.300,00	100%	96.57%	6	710.491.500,00	150%	86.65%	-	
3.2.5.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawak, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dapat diadakan	Sarpras	0	625.000,00	2	223.885.000,00	2	95.000.000,00	0	-	0	-	2	87.807.800,00	0	4.956.000,00	2	92.763.800,00	100%	97.65%	4	316.648.800,00	0%	50.66%	-	
3.2.5.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	1	25.000,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	4.956.000,00	1	4.956.000,00	100%	99.12%	2	14.956.000,00	200%	59.82%	-	Terlaksananya indikator sub kegiatan jumlah data dan informasi sumberdaya ikan sebanyak 1 dokumen berupa profil perikanan tangkap TA 2023
3.2.5.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	Unit	1	-	1	-	10	90.000.000,00	0	-	0	-	10	87.807.800,00	0	-	10	87.807.800,00	100%	97.56%	11	87.807.800,00	1100%	0%	-	Tercapainya indikator sub kegiatan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia berupa terlaksananya bantuan hibah 10 unit sarana untuk 2 KUB

3.2 5.0 3.2. 02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang berdaya	Nelayan	0	170.000,00	25	344.470.200,00	50	42.000,00	0	-	20	-	20	32.760.000,00	10	6.612.500,00	50	39.372.500,00	100%	93.74%	75	383.842.700,00	0%	225.79%	-		
3.2 5.0 3.2. 02. 000 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkatkan kapasitasnya	Orang	130	50.000,00	25	319.740.200,00	25	28.000,00	0	-	0	-	25	25.452.000,00	0	-	25	25.452.000,00	100%	90.9%	50	345.192.200,00	38.46%	690.38%	-	Tercapainya indikator sub kegiatan jumlah nelayan yang meningkatkan kapasitasnya berupa terlaksananya pelatihan untuk 25 istri nelayan	
3.2 5.0 3.2. 02. 000 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	kelompok	30	50.000,00	30	4.860.000,00	30	5.000,00	5	-	10	-	15	5.000,00	0	-	30	5.000,00	100%	100%	60	9.860.000,00	200%	19.72%	-	Tercapainya indikator sub kegiatan jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya berupa terlaksananya pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kelompok nelayan sebanyak 25 KUB (83 %) s/d triwulan III	
3.2 5.0 3.2. 02. 000 3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Unit Usaha	200	70.000,00	300	19.870.000,00	100	9.000,00	0	-	50	-	25	2.308.000,00	25	6.612.500,00	100	8.920.500,00	100%	99.12%	400	28.790.500,00	200%	41.13%	-	Tercapainya indikator sub kegiatan jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha berupa terlaksananya sosialisasi akses permodalan dan BPIS	



																								gan	SIPD membuat selisih harga, sehingga tidak bisa di SPJ kan - Penerima bantuan masih pemula			
3.2 5.0 4.2. 02. 000 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	kelompok	30	40.000.000,00	10	10.000.000,00	8	5.000.000,00	2	-	2	-	3	3.105.500,00	1	1.767.500,00	8	4.873.000,00	100%	97.46%	18	14.873.000,00	60%	37.18%	-	Keseriusan pokdakan untuk membenahi kekurangan administrasi	Kurang tertibnya administrasi dari pokdakan
3.2 5.0 4.2. 03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	TDPIK	0	20.000.000,00	25	5.000.000,00	15	5.000.000,00	3	-	4	-	5	2.042.000,00	3	2.958.000,00	15	5.000.000,00	100%	100%	40	10.000.000,00	0%	50%	-		
3.2 5.0 4.2. 03. 000 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudi daya ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rekomendasi	50	20.000.000,00	25	5.000.000,00	15	5.000.000,00	3	-	4	-	5	2.042.000,00	3	2.958.000,00	15	5.000.000,00	100%	100%	40	10.000.000,00	80%	50%	-	Adanya aplikasi perizinan dan fasilitasi pelayanan satu pintu di kabupaten pamekasan	Minimnya anggaran dan sarana dan prasarana, minimnya keinginan pelaku usaha perikanan budidaya untuk melengkapi dokumen usahanya
3.2 5.0 4.2. 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang dikelola	Sarpras Budidaya	0	795.000.000,00	3	1.849.619.000,00	2	250.000.000,00	0	-	1	7.207.500,00	0	14.163.500,00	1	213.967.000,00	2	234.767.750,00	100%	93.91%	5	2.084.386.750,00	0%	262.19%	-		
3.2 5.0 4.2. 04. 000 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	3	20.000.000,00	3	7.500.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0	2.486.000,00	1	2.322.500,00	1	4.808.500,00	100%	96.17%	4	12.308.500,00	133.33%	61.54%	-	Adanya aplikasi memudahkan dalam melakukan pengolahan dan pemantauan data	Pelaporan data dan informasi pembudidayaan ikan dilakukan pada Triwulan IV

3.2 5.0 4.2. 04. 000 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Dokumen	50	75.00 0.000, 00	50	55.912. 500,00	1	45.0 00.0 00,0 0	0	-	0	7.207. 500,0 0	0	11.67 7.500 ,00	1	16.16 4.250, 00	1	35.0 49.2 50,0 0	100 %	77.8 9%	51	90.9 61.7 50,0 0	102 %	121.2 8%	-	Dinas Perikanan memiliki alat uji kualitas air (pH, DO, Nitrit, dan Amonia)	1. Mininnya pengetahuan RTP Pembudidaya ikan dalam melakukan manajemen kualitas air 2. Anggaran tidak dapat terserap semua dikarenakan harga pakan di SSH yang terlalu tinggi (SSH telah direncanakan dan diajukan sebelumnya sesuai dengan penambahan inflasi, namun di Tahun 2023 harga pakan turun)
3.2 5.0 4.2. 04. 000 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	-	6	229.475 .000,00	4	200. 000. 000, 00	0	-	0	-	0	-	4	194.9 10.00 0,00	4	194. 910. 000, 00	100 %	97.4 6%	10	424. 385. 000, 00	250 %	0%	-		Anggaran tidak dapat terserap semua dikarenakan adanya sisa kontrak.
3.2 5.0 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	%	75	100.0 00.00 0,00	75	24.979. 000,00	75	12.0 00.0 00,0 0	0	-	37	-	0	5.249 .700, 00	38	6.750. 300,0 0	38	12.0 00.0 00,0 0	50.6 7%	100 %	113	36.9 79.0 00,0 0	150. 67 %	36.98 %	-		
3.2 5.0 5.2. 01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya perikanan yang terawasi	Sumber daya perikanan	0	100.0 00.00 0,00	5	24.979. 000,00	2	12.0 00.0 00,0 0	0	-	1	-	0	5.249 .700, 00	1	6.750. 300,0 0	2	12.0 00.0 00,0 0	100 %	100 %	7	36.9 79.0 00,0 0	0%	36.98 %	-		

3.2 5.0 5.2. 01. 000 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Dokumen	2	50.000.000,00	2	12.500.000,00	1	6.000.000,00	0	-	0	-	0	833.700,00	1	5.166.300,00	1	6.000.000,00	100%	100%	3	18.500,000,00	150%	37%	-	Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara DKP Provinsi Jatim, Cabang Dinas Probolinggo, Dinas perikanan Pamekasan, Penyuluh Perikanan, Nelayan, pokmaswas serta pemangku kebijakan lainnya dalam upaya peningkatan pengawasan perikanan tangkap,	Minimnya anggaran yg dialokasikan terhadap kegiatan pengawasan perikanan tangkap, sarana dan prasarana serta keterbatasan SDM dalam pembagian tugas pemangku kebijakan
3.2 5.0 5.2. 01. 000 2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan budidaya dan pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Dokumen	3	50.000.000,00	3	12.479.000,00	1	6.000.000,00	0	-	0	-	0	4.416.000,00	1	1.584.000,00	1	6.000.000,00	100%	100%	4	18.479,000,00	133,33%	36,96%	-	Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas perikanan, Penyuluh Perikanan, Pelaku usaha Perikanan budidaya serta pemangku kebijakan lainnya dalam upaya peningkatan pengawasan perikanan budidaya	Minimnya anggaran yg dialokasikan terhadap kegiatan pengawasan perikanan budidaya dan keterbatasan SDM dalam pembagian tugas pemangku kebijakan, minimnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya tentang regulasi peraturan perizinan usaha perikanan budidaya
3.2 5.0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	%	100	340.000.000,00	98	707.194.000,00	100	51.000.000,00	0	-	58	8.705.000,00	0	26.010.700,00	42	15.448.000,00	42	50.163.700,00	42%	98,36%	140	757.357.700,00	140%	222,75%	-	Tim pendataan, pengolahan dan penginputan data di bidang pengolahan yg aktif membantu kelancaran program	Anggaran yang sangat minim dan keterbatasan SDM yang menghambat pelaksanaan program pendataan

		Jumlah Poklahsar Yang Naik Kelas	Poklahsar	4		2		2		0		0		2		0		2		100 %		4		100 %		Keseriusan poklahsar untuk membenahi kekurangan administrasi	Kurang tertibnya administrasi dan minimnya pengetahuan kelembagaan dari poklahsar	
3.2 5.0 6.2. 01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah TDUP Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Kecil Mikro yang Disediakan	TDUP	0	15.00 0.000, 00	12	4.679.0 00,00	10	5.00 0.00 0,00	2	-	4	1.784. 500,0 0	3	1.135 .000, 00	1	1.925. 500,0 0	10	4.84 5.00 0,00	100 %	96.9 %	22	9.52 4.00 0,00	0%	63.49 %	-	Tim pendataan, pengolahan dan penginputan data di bidang pengolahan yg aktif membantu kelancaran program	Anggaran yg sangat minim dan keterbatasan SDM yg menghambat pelaksanaan pendataan
3.2 5.0 6.2. 01. 000 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2	15.00 0.000, 00	2	4.679.0 00,00	1	5.00 0.00 0,00	0	-	0	1.784. 500,0 0	0	1.135 .000, 00	1	1.925. 500,0 0	1	4.84 5.00 0,00	100 %	96.9 %	3	9.52 4.00 0,00	150 %	63.49 %	-	Tim pendataan, pengolahan dan penginputan data di bidang pengolahan yg aktif membantu kelancaran program	Anggaran yg sangat minim dan keterbatasan SDM yg menghambat pelaksanaan pendataan
3.2 5.0 6.2. 02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar yang dibina mutu dan keamanan hasil perikanan	Poklahsar	0	75.00 0.000, 00	5	23.752. 500,00	5	13.0 00.0 00,0 0	0	-	3	3.457. 000,0 0	2	5.880 .000, 00	0	3.650. 000,0 0	5	12.9 87.0 00,0 0	100 %	99.9 %	10	36.7 39.5 00,0 0	0%	48.99 %	-	1. Adanya program Halal gratis bagi UKM Mikro dari BPJPH Kemenag 2. Adanya program monitoring dan uji laboratoriu m produk perikanan gratis dari DKP Prov. Jatim 3. Adanya kerjasama dengan Petugas Pendamping Halal (PPH) Pamekasan 4. Adanya kerjasama dengan Rumah BUMN terkait PIRT	Keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua UKM perikanan mendapatkan fasilitas mutu (legalitas)

3.2 5.0 6.2. 02. 000 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan risiko	Unit Usaha	150	75.00 0.000, 00	40	23.752. 500,00	5	13.0 00.0 00,0 0	0	-	3	3.457. 000,0 0	2	5.880 .000, 00	0	3.650. 000,0 0	5	12.9 87.0 00,0 0	100 %	99.9 %	45	36.7 39.5 00,0 0	30 %	48.99 %	-	"1. Adanya program Halal gratis bagi UKM Mikro dari BPJPH 2. Adanya program monitoring dan uji laboratoriu m produk perikanan gratis dari DkP Prov. Jatim 3. Adanya kerjasama dengan Petugas Pendamping Halal (PPH) Pamekasan 4. Adanya kerjasama dengan Rumah BUMN terkait PIRT"	Keterbatasan anggaran,s hingga tidak semua UKM perikanan mendapatkan fasilitasi mutu (legalitas)
3.2 5.0 6.2. 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah konsumsi ikan	Kg/Kpt /Th	0	250.0 00.00 0,00	43	678.762 .500,00	44	33.0 00.0 00,0 0	0	-	20	3.463. 500,0 0	11	18.99 5.700 ,00	13	9.872. 500,0 0	44	32.3 31.7 00,0 0	100 %	97.9 7%	87	711. 094. 200, 00	0%	284.4 4%	-	Adanya kerjasama dan kolaborasi dari DkP provinsi/in stansi/PKK /lembaga lainnya terkait gemarikan dan promosi, Responsif dan kerjasama yang baik dr Ukm binaan sehingga membantu pelaksanaa n program	Masih minimnya informasi ketersediaa n stok ikan krn minimny SDM dan anggaran, adanya recofussing yg tidak menghamb at pencapaian kinerja,
3.2 5.0 6.2. 03. 000 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/k ota	Ton	100 0	175.0 00.00 0,00	600	131.962 .500,00	60	33.0 00.0 00,0 0	15	-	20	3.463. 500,0 0	10	18.99 5.700 ,00	15	9.872. 500,0 0	60	32.3 31.7 00,0 0	100 %	97.9 7%	660	164. 294. 200, 00	66 %	93.88 %	-	Adanya kerjasama dan kolaborasi dari DkP provinsi/in stansi/PKK /lembaga lainnya terkait gemarikan dan promosi, Responsif dan kerjasama yang baik	Masih minimnya informasi ketersediaa n stok ikan krn minimny SDM dan anggaran, adanya recofussing yg tidak menghamb at pencapaian kinerja,

